

**PERJANJIAN MAGANG SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
PEMAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA**

RIZKI DANIEL

ABSTRAK

Pembangunan nasional melalui dimensi Ketenagakerjaan merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia pasal 28D sehingga terbentuklah peraturan hukum yang menaungi amanat tersebut melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri yang membidangi hal tersebut. Penelitian ini membahas perjanjian magang sebagai bentuk perlindungan bagi pemagang dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun magang merupakan langkah penting dimana melalui magang ini berdampak positif yang sangat signifikan untuk menyiapkan pemagang memasuki dunia kerja namun tidak terlepas juga akan tantangan dalam penerapan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perjanjian magang terkhusus dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri serta temuan terhadap beberapa bunyi pasal yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan sehingga berimplikasi hukum kepada ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian magang yang menjadi “jaring” pembatas agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum melalui perjanjian magang yang konstruktif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hak-hak pemagang, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dalam pengaturan perjanjian magang di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata kunci : Perjanjian, Magang, Perlindungan, Pemagang, Ketenagakerjaan

**INTERNSHIP AGREEMENT AS A FORM OF PROTECTION
INTERNSHIP FROM A LEGAL PERSPECTIVE EMPLOYMENT
IN INDONESIA**

RIZKI DANIEL

ABSTRACT

The scope of national development through employment is stated in Article 28D of the Constitution of the Republic of Indonesia; therefore, the legal provisions governing this mandate are set out in Law No. 13 of 2003 on Labor Affairs and Ministerial Regulations in this regard. This study examines internship contracts as a form of protection for interns from the perspective of labor law in Indonesia. Even though apprenticeships are an important step because they have a very significant positive impact on preparing apprentice for the labor market, this cannot be separated from the challenges of implementing adequate legal protection for them. This study analyzes the legal provisions regarding apprenticeship covenant, in particular in the labor laws and regulations of the Indonesia Minister of Manpower on guidelines for the organization of apprenticeships in the country, and regarding several articles that do not provide certainty and protection so that they have legal implications for non-compliance with these regulations in the implementation of making internship agreements which become a "net" of obstacles in order to create legal certainty and protection through constructive internships. Using a qualitative approach, this study aims to provide a better understanding of the protection of apprentices' rights and recommend steps to improve the regulation of apprenticeships in Indonesia. We hope that the results of this research can contribute to a fairer employment policy and support the development of a high-quality workforce.

Keywords : Covenant, Internship, Protection, Apprentice, Manpower